

**LAPORAN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2024**

DINAS SOSIAL



**PEMERINTAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial tahun 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah mau pun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan selesainya Rencana Kerja Perangkat Daerah ini, diharapkan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial dapat mempedomani Renja ini sehingga tujuan dan sasaran yang kita harapkan dalam pencapaian program prioritas pembangunan Kota Padangsidempuan untuk satu tahun kedepan dapat dicapai.

Akhirnya, dengan segala kelemahan dan kekurangan kami selaku individu tidak menutup diri dari segala masukan dan kritikan demi kebaikan penyusunan RENJA yang lebih baik.

Padangsidempuan, September 2023.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	37
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi.....	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	39
3.3 Program dan Kegiatan	45
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	74
BAB V PENUTUP	
81.....	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Penyusunan Renja Dinas Sosial berdasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun anggaran yang berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan disusun berdasarkan RKPD Kota Padangsidimpuan dan Renstra Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan.

Selanjutnya Renja Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Kota Padangsidimpuan Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Padangsidempuan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, tambahan negara Republik Indonesia Nomor 6397)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Informasi Keluarga;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah

Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota

13. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
16. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2019 Nomor 2); dan
18. Peraturan Walikota Padang Sidempuan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan (Berita Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Sidempuan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan.
19. Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2019-2023.
20. Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Padangsidempuan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Padangsidempuan tahun 2024.

Tujuan disusunnya Renja ini adalah sebagai pedoman :

1. Pelaksanaan Perangkat Daerah;
2. Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3. Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini memuat :

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi;
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3 Program Dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2022, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, 2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Dinas Sosial Kota Padangsidempuan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidempuan selama tahun 2022 dan tahun 2023.

Pada Tahun 2022 total anggaran Dinas Sosial Kota Padangsidempuan sebesar Rp. **8.636.207.030**

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Pencapaian kinerja tahun 2023 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target kinerja tahunan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Padangsidempuan Periode 2019-2023, dikarenakan Rencana Kerja 2023 masih dalam tahun berjalan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial pada tahun anggaran 2022 didukung oleh 6 program 13 kegiatan dan 37 sub kegiatan meliputi :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pada Tahun 2022 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan capaian sebesar 100% dan pada Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan capaian sebesar 20% dengan predikat sangat rendah.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah kegiatan Sebanyak 7 Kegiatan yang terdiri dari 22 sub Kegiatan ,

- Yang Memenuhi Target : 7 Kegiatan Memenuhi Target
terdiri dari 21 sub Kegiatan

- Yang Tidak Memenuhi Target : 1 Sub Kegiatan Tidak Memenuhi Target
- Yang Melebihi Target : -

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Program Pemberdayaan Sosial terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Pada Tahun 2022 Program Pemberdayaan Sosial dengan capaian sebesar 51% dan pada Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I untuk Program Pemberdayaan Sosial dengan capaian sebesar 0% dengan predikat sangat rendah.

Pada Program Pemberdayaan Sosial dengan jumlah kegiatan Sebanyak 1 Kegiatan yang terdiri dari 2 sub Kegiatan ,

- Yang Memenuhi Target : 1 Kegiatan Memenuhi Target terdiri dari 2 sub Kegiatan
- Yang Tidak Memenuhi Target : -
- Yang Melebihi Target : -

III. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Program Rehabilitasi Sosial terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Permakanan
 - b. Penyediaan Sandang
 - c. Penyediaan Alat Bantu
 - d. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - e. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

Pada Tahun 2022 Program Rehabilitasi Sosial dengan capaian sebesar 100% dan pada Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I untuk Program Rehabilitasi Sosial dengan capaian sebesar 0% dengan predikat sangat rendah.

Pada Program Rehabilitasi Sosial dengan jumlah kegiatan Sebanyak 1 Kegiatan yang terdiri dari 6 sub Kegiatan ,

- Yang Memenuhi Target : 1 Kegiatan Memenuhi Target terdiri dari 3 sub Kegiatan
- Yang Tidak Memenuhi Target : 1 Kegiatan Memenuhi Target terdiri dari 2 sub Kegiatan
- Yang Melebihi Target : -

IV. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Pada Tahun 2022 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan capaian sebesar 100% dan pada Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I untuk Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan capaian sebesar 0% dengan predikat sangat rendah.

Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan jumlah kegiatan Sebanyak 1 Kegiatan yang terdiri dari 4 sub Kegiatan ,

- Yang Memenuhi Target : 1 Kegiatan Memenuhi Target terdiri dari 4 sub Kegiatan
- Yang Tidak Memenuhi Target : -
- Yang Melebihi Target : -

V. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Program Penanganan Bencana terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Makanan
 - b. Penanganan Khusus Keompok Rentan

2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap siagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Pada Tahun 2022 Program Penanganan Bencana dengan capaian sebesar 100% dan pada Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I untuk Program Penanganan Bencana Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan capaian sebesar 0% dengan predikat sangat rendah.

Pada Program Penanganan Bencana dengan jumlah kegiatan Sebanyak 2 Kegiatan yang terdiri dari 3 sub Kegiatan ,

- | | |
|------------------------------|--|
| - Yang Memenuhi Target | : 1 Kegiatan Memenuhi Target terdiri dari 1 sub Kegiatan |
| - Yang Tidak Memenuhi Target | : 1 Kegiatan Memenuhi Target terdiri dari 2 sub Kegiatan |
| - Yang Melebihi Target | : - |

VI. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan terdiri dari kegiatan :

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - a. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Pada Tahun 2022 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan capaian sebesar 100% dan pada Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I untuk Program Taman Makam Pahlawan dengan capaian sebesar 0% dengan predikat sangat rendah.

Pada Program Penanganan Bencana dengan jumlah kegiatan Sebanyak 1 Kegiatan yang terdiri dari 1 sub Kegiatan ,

- Yang Memenuhi Target : 1 Kegiatan Memenuhi Target terdiri dari 1 sub Kegiatan
- Yang Tidak Memenuhi Target : -
- Yang Melebihi Target : -

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

					Pemerintahan Daerah															
01	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang dipenuhi kebutuhan listrik, komunikasi	24	bulan	Bulan	12	bulan	24	Bulan	100%	24	Bulan	24	67%		
01	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang di Pelihara	4	Unit	Unit	30	Unit	30	Unit	100%	30	Unit	30	100%		
01	06	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa petugas kebersihan dan keamanan	12	orang/bulan	orang/bulan	132	orang/bulan	264	orang/bulan	100%	12	Jenis	264	67%		
01	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
01	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1	Unit	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	1	100%		
01	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Perorangan dinas atau lapangan	jumlah kendaraan dinas lapangan yang dipelihara	3	Unit	Unit	3	unit	3	Unit	100%	3	Unit	3	100%		
01	06	01	2.09	09	Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Luas Gedung Kantor yang dipelihara	1	Unit	Unit	2	Unit	2	Unit	100%	1	Unit	2	100%		
1	06	02			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Jumlah Psm,TKS,PSKS, LK3 yang diberdayakan	100	%	- %	50	%	22	%	44%	100	%	122			
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan							100					100			

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

					Sosial Daerah Kabupaten/Kota														
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang ditingkatkan Kemampuannya	26	Orang	Orang	27	Orang	27	Orang	100%	100	Orang	27	100%	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Keluarga yang ditingkatkan Kemampuannya	2	Lembaga	Lembaga	2	Lembaga	2	Lembaga	100%	2	Lembaga	2	100%	
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Jumlah Orang Yang Terlayani Rehabilitasi Sosialnya Sesuai Dengan Standar Pelayanan yang Dimaksud	100	%	-	%	155	%	53	%	34%	100	%	153	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial														
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang disediakan permakanan	150	Orang	-	Orang	180	Orang	280	Orang	100%	230	Orang	280	51%
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang disediakan sandang	100	Orang	-	Orang	135	Orang	235	Orang	100%	250	Orang	235	47%
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas yang disediakan alat bantu	20	Orang		Orang	60	Orang	97	Orang	100%	30	Orang	97	61%
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan	jumlah orang yang diberikan layanan	20	Orang		Orang	35	Orang	29	Orang	60%	35	Orang	47	67%

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

					Reunifikasi Keluarga	reunifikasi keluarga													
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	jumlah orang yang diberikan layanan penelusuran keluarga	20	Orang	Orang	0	Orang	33	Orang	50%	35	Orang	45	60%	
1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin dan anak telantar yang diberi perlindungan	100	%		39	%	47	%	120%	100	%			
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							47							
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang Updating Data	95329	Desa/Kel	Desa/Kel	79	Desa/Kel	79	Desa/Kel	100%	89432	Orang	79	100%	
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Bansos yang dikelola	11000	kpm	Kpm	9.000	kpm	9.000	Kpm	84%	9.000	Kpm	7.530	84%	
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Bansos yang difasilitasi pendampingannya	1158	kpm	Kpm	11.170	kpm	11.170	Kpm	84%	10.158	Kpm	7.530	84%	
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah keluarga yang difasilitasi pengembangan ekonominya	15	kpm	Kpm	30	kpm	70	Kpm	83%	100	Orang	70	59%	
1	06	06			Program Penanganan Bencana	Persentase fakir miskin dan anak telantar yang diberi perlindungan Jaminan Sosial	100	%	-	%	37	%	%	0%	100	%			
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota														
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana Alam/Sosial yang disediakan Makanan	100	Orang	Orang	200	Orang	193	Orang	29%	200	Orang	243	41%	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Rentan	30	Orang	-	Orang	60	Orang	62	Orang	38%	50	Orang	83	28%
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan PEMBERDAYAAN Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota									-					
					Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung Siaga Bencana Yang Dipersiapkan/dilatih	1	Orang	100	Orang	-	orang	-	Orang	-	-	Orang	-	0%
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana Yang Diberdayakan	34	Orang	40	Orang	29	orang	29	Orang	97%	34	Orang	28	93%
1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100	%	-	%	117	%	86	%	74%	100	%	186	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Luas makam pahlawan yang dipelihara	4	M2		M2	3.416	M2	3.416	M2	100%	4	Dokumen	3.416	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Padangsidempuan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut :

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kota Padangsidempuan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase PPKS yang tertangani			40%	50%	32%	37%	40%	36,51%	50%	40%	20%	Tercapai
2	Persentase Penurunan PPKS			0,27%	0,36%	3,51%	5,21%	6,09%	0.73%	0,62%	6.09%	5%	Tidak Tercapai
3	Indeks Partisipasi Sosial			0,680	0,680	0,680	0,682	0,680	0,670	0,696	0,684	0,698	Tercapai
4	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar		√	13	30	32	35	45	10	44	45	100	Tercapai

	panti (Indikator SPM)												
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	√	66	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
6	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	√	100	100	100	100	100	21	22	100	100	Tidak Tercapai	
7	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	√	100	100	100	100	100	62,79	100	100	100	Tercapai	
8	Jumlah warga negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	√	100	100	100	100	100	4,31	25,27	100	100	Tidak Tercapai	

9	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar diluar panti	√		100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
10	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	√		100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

Capaian indikator kinerja persentase PPKS yang tertangani untuk tahun 2021 memperoleh hasil yang maksimal. Dimana pada tahun 2021 pemerintah banyak mengucurkan bantuan sosial sehubungan dengan pandemic covid 19 yang mengubah tatanan perekonomian masyarakat. Pada tahun 2022 indikator ini hanya memperoleh capaian 50 %.

Indikator kinerja penurunan PPKS untuk tahun 2021 dan tahun 2022 tidak tercapai. Rendahnya jumlah graduasi mandiri dari KPM PKH disebabkan oleh beberapa hal diantaranya : - Pola pikir masyarakat tentang bantuan yang masih menganggap hak yang wajib diterima setiap bulan dan tidak ada keinginan untuk keluar dari keanggotaan PKH/BPNT: - Kurangnya komitmen dari pendamping PKH untuk membuat target KPM Graduasi Mandiri.

Capaian indikator indeks partisipasi sosial memperoleh hasil yang maksimal tahun 2021 dan tahun 2022 .Capaian indikator kinerja utama ini termasuk dalam kriteria sangat tinggi tetapi untuk penilaian IPS masih dalam tingkat kualitatif cukup.

Untuk target indikator SPM yang tercapai pada tahun 2021 adalah rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti dan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana. Pada tahun 2022 selain dua indikator tersebut, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti juga mencapai target yang diharapkan.

Kendala dalam Pencapaian IKK dan SPM

- Data PPKS yang kurang Valid khususnya di Bidang Rehabilitasi Sosial (Data Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis);
- Masih Minimnya Anggaran Untuk Pengelolaan Rehabilitasi Sosial;
- Fasilitas sarana dan prasarana dalam penanganan PPKS masih belum memadai;
- Kurangnya Kerjasama dari OPD terkait dalam penanganan PPKS.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu- isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Isu strategis bagi dinas sosial diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial di masa mendatang.

Hasil penelaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu disikapi dengan cara menerapkan strategi guna menindaklanjuti faktor- faktor penghambat dan memanfaatkan faktor-faktor pendorong dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Padangsidempuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial atau dengan kata lain hal-hal tersebut merupakan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kota Padangsidempuan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka ada 2 (dua) isu strategis didinas Sosial Kota Padangsidempuan yaitu:

1. Pengembangan teknologi informasi dalam upaya penyediaan data dan informasi terpadu kemiskinan dan PPKS lainnya serta untuk penguatan kapasitas PSKS dan PPKS dalam pengelolaan bantuan sosial yang diberikan secara Tunai dan Non Tunai
2. Pembangunan Kesejahteraan Sosial kedepan dihadapkan kepada berbagai tantangan, hambatan, dan perubahan permasalahan sosial yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti:
 - Permasalahan lanjut usia terlantar yang cenderung meningkat akibat kemiskinan,
 - Terbatasnya akses pelayanan bagi penyandang disabilitas

Pemetaan Permasalahan Dinas Sosial Kota Padangsidempuan

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Taraf Kesejahteraan PPKS Yang Masih Rendah	Kuantitas penanganan PPKS Masih Belum Optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam penanganan PPKS 2. Belum maksimalnya pemenuhan kebutuhan dasar rehabilitasi sosial PPKS 3. Rendahnya angka penurunan PPKS 4. Permasalahan terkait disabilitas antara lain terkait penyediaan infrastruktur, aksesibilitas dan kurangnya tenaga pendamping yang berkompeten 5. Kesiapsiagaan penanganan bencana yang belum optimal 6. Masih rendahnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial
	Kualitas Layanan Yang Belum Berkualitas Oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Pelatihan dan bimbingan teknis kepada SDM yang ada di Dinas Sosial 2. Kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial masih kurang maksimal 3. Kualitas dan Kuantitas SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial Profesional belum optimal

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial antara lain :

2.1.1 Tantangan

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Dinas Sosial memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur dalam urusan sosial yang menangani permasalahan sosial bidang kesejahteraan social begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh Dinas sosial dalam pencapaian indikator kinerja daerah diantaranya adalah :

- Perubahan kebijakan ataupun perubahan regulasi yang terus menerus dalam perihal bantuan sosial.
- Masih minimnya sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan kebencanaan
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program-program pembangun Bidang Kesejahteraan Sosial
- Mobilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial/PPKS yang cukup tinggi.
- Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin tinggi dan semakin transparan.
- Masalah data yang cepat begitu berubah sehingga menuntut konsekuensi di bidang data .
- Terbatasnya akses pelayanan bagi penyandang disabilitas.
- Permasalahan lanjut usia yang cenderung meningkat akibat kemiskinan.
- Munculnya tuna sosial (Gepeng).

2.1.2 Peluang

Dari beberapa kendala diatas ada peluang yang harus diambil yaitu :

- DTKS sebagai pusat acuan data dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- Regulasi mengenai peningkatan Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- Adanya bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan SDM yang kompeten.
- MOU lintas sektor OPD dalam hal penanganan PPKS
- Tingginya tingkat responsibilitas masyarakat, lembaga, pemerintah terhadap tanggap bencana
- Tersedianya aplikasi yang berbasis Teknologi yang melibatkan desa/kelurahan.
- Adanya dukungan dana dari pusat dan APBD Kota Padangsidempuan untuk pengembangan potensi PPKS sehingga dapat memberikan kesempatan yang luas kepada PPKS untuk mendorong agenda memprioritaskan pengentasan kemiskinan sebagai skala prioritas yang utama.
- Komitmen serta dukungan dari Dinas Sosial Kota Padangsidempuan berupa sharing anggaran untuk pembinaan potensi KUBE dan TKSK agar dapat memfasilitasi masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam memberikan modal usaha yang diberikan oleh Dinas Sosial.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Padangsidempuan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Padangsidempuan. Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidempuan. Program dan kegiatan Tahun 2024 yang telah diusulkan oleh Dinas Sosial Kota Padangsidempuan merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2024.

Setelah melakukan analisis kebutuhan terhadap program dan kegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD, disimpulkan bahwa dari 6 program dan 13 kegiatan dan 39 sub kegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD, beberapa kegiatan mengalami perubahan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Padangsidempuan**

Dinas Sosial Kota Padang Sidempuan												
No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Sidempuan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	100%	4.335.165.550	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Sidempuan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	100%	3.745.477.817	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang Sidempuan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	8 Dokumen	68.191.206		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang Sidempuan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	8 Dokumen	15.945.690	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Padang Sidempuan	jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.868.324		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Padang Sidempuan	jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.945.690	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	64.322.882		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	12.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Sidempuan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	100%	2.824.103.598		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Sidempuan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat	100%	2.824.103.598	

								tertangani				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Sidempuan	jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang	2.824.103.598		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Sidempuan	jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang	2.824.103.598		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang Sidempuan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	100%	99,760,000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang Sidempuan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	100%	83.177.728		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	52,000,000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	52.000.000,00		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	8 Orang	47,760,000		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	12 Orang	31.177.728		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Sidempuan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	100%	705,614,416		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Sidempuan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	100%	461.293.215		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,498,360		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.464.529		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	44,562,000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	29.090.000		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	67,877,630		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	44.310.516		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	100,091,563		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	66.007.973		

Renja Dinas Sosial 2024

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	44,999,863		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	29.375.910	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	568 Dokumen	46,000,000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	400 Dokumen	30.028.800	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40 Laporan	39,819,000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	25.993.843	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	369 Laporan	347,766,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225 Laporan	227.021.644	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang Sidempuan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	100%	264,921,686		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang Sidempuan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	100%	11.590.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	250,000,000		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	
Pengadaan Mebel	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	14,921,686		Pengadaan Mebel	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	11.559.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Sidempuan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	40 Laporan	289,144,644		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Sidempuan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	40 Laporan	262.265.408	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	50,400,000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	50.400.000,00	

Renja Dinas Sosial 2024

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	55,860,000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	36.465.408,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	182,884,644		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	175.400.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Sidempuan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	5 Unit	83,430.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Sidempuan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	5 Unit	87.102.178	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	53,430,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	34.879.104	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	32.639.074	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30,000,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19.584.000	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kota Padang Sidempuan	Persentase PSKS Perorangan, Kelembagaan dan Sumber Dana Bantuan yang berperan aktif serta dapat dikelola oleh penyelenggara	100%	827,058,855	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kota Padang Sidempuan	Persentase PSKS Perorangan, Kelembagaan dan Sumber Dana Bantuan yang berperan aktif serta dapat dikelola oleh	100%	528.000.000	

			sosial						penyelenggara sosial			
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	Jumlah izin yang diterbitkan sehubungan dengan pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Dok	19.496.840		-	-	-	-	-	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Yang Meningkatkan Kapasitasnya	100%	807.562.015		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:%)	100%	528.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	364.521.845		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	278.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	400.000.000		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	250.000.000	

3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Padang Sidempuan	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis dan PMKS Lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti	100%	882.620.397	3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Padang Sidempuan	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis dan PMKS Lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti	100%	553.324.200	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Padang Sidempuan	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis dan PMKS Lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti	695 Orang	882.620.397		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Padang Sidempuan	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis dan PMKS Lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti	445 Orang	553.324.200,	
	Penyediaan Permakanan	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	230 Orang	197.365.902		Penyediaan Permakanan	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	128.840.000	
	Penyediaan Sandang	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	252.974.571		Penyediaan Sandang	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	165.141.700	
	Penyediaan Alat Bantu	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga	30 Orang	143.550.138		Penyediaan Alat Bantu	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu	20 Orang	93.709.500,00	

Renja Dinas Sosial 2024

			Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota						Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	50.280.000		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	49.142.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	60.000.000		-	-	-	-	-	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	58.434.485		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	38.146.000	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	120.015.301		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	78.345.000	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Padang Sidempuan	Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	50%	967.711.658	4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Padang Sidempuan	Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	50%	653.780.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan	10.158 keluarga	967.711.658		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan	10.158 Keluarga	653.780.000	

			dan jaminan sosial					dan jaminan sosial				
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	95.329 Orang	137.720.762		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	95.329 Orang	52.500.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	11.000 Keluarga	72.806.366		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	11.000 Keluarga	42.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.158 Keluarga	570.297.098		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.500 Keluarga	372.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	186.887.432		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	187.280.000	
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kota Padang Sidempuan	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tk.kota yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	100%	832.457.356	5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kota Padang Sidempuan	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tk.kota yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	100%	587.364.450	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tk.kota yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	250 Orang	370.333.298		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tk.kota yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	130 Orang	238.546.450	

	Penyediaan Makanan	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	87.433.298		Penyediaan Makanan	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	57.076.450	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	250.000.000		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	160.000.000	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	32.900.000		Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	21.470.000	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tk.kota yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	34 Orang	462.124.058		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tk.kota yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	34 Orang	348.818.000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	75.000.000		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	46.818.000	

	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	34 Orang	387.124.058		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Orang	302.000.000	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kota Padang Sidempuan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dengan baik	100%	59.652.786		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kota Padang Sidempuan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dengan baik	100%	35.000.000,00	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dengan baik	1 Taman	59.652.786		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dengan baik	1 Taman	35.000.000,00	
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	4 Dokumen	59.652.786		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dengan baik	1 Taman	35.000.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Tgl Usul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	OPD Tujuan	Rekomendasi Mitra Bappeda
17-01-2023	Kelurahan / Desa	Sosial	Pemutakhiran Data Bantuan Sosial	karena masih banyak penghasilan warga yang dibawah UMR atau yang tidak menetap	Desa Perkebunan PK, Kota Padangsidimpuan	Padangsidimpuan Tenggara	Perkebunan Pijor Koling	Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Usulan sesuai, Teruskan Ke Kecamatan
20/01/2023	Kelurahan / Desa	Sosial	Pemutakhiran Data Bantuan Sosial	banyak warga penerima bansos yang tidak cair bansos nya,dan agar mempermudah dalam mengajukan penerima BLT di desa supaya tidak tumpang tindih	Desa Singali, Kota Padangsidimpuan	Padangsidimpuan Hutaimbaru	Singali	Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Usulan sesuai, Teruskan Ke Kecamatan

Tabel T-C 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Padangsidempuan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Padang Sidempuan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Updating Data	6 Kecamatan	

Yang diakomodir di rancangan awal dari hasil musrenbang dan pikir adalah Pemutakhiran Data Bantuan Sosial, Usulan ini diterima karena pada tahun 2024 Dinas Sosial ada mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dimaksud.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah perencanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Padangsidempuan disusun dengan merujuk pada kebijakan Nasional untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan agar sesuai dengan yang direncanakan. Sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 tentang kebijakan dan program prioritas tahun 2024. untuk Kabupaten/ Kota pembangunan bidang urusan wajib yang berpatok terlaksana SPM (standar Pelayanan Minimal, Untuk urusan bidang sosial adalah sebagai berikut :

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti yaitu terpenuhinya kebutuhan Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti. Indikatornya dapat berupa :
 - a. Layanan data dan pengaduan
 - b. Layanan kedaruratan
 - c. Penyediaan permakanan
 - d. Penyediaan sandang
 - e. Penyediaan alat bantu
 - f. Penyediaan perbekalan kesehatan
 - g. Pemberian bimbingan fisik, mental spritiual dan social
 - h. Pemberian bimbingan social kepada keluarga
 - i. Fasilitasi pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan kartu idetitas anak
 - j. Akses ke Layanan pendidikan dan kesehatan dasar
 - k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
 - l. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
 - m. Layanan Rujukan
2. Perlindungan Sosial Korban bencana Alam dan Sosial
Yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan social meliputi :
 - a. Penyediaan permakanan
 - b. Penyediaan sandang
 - c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi
 - d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan

e. Pelayanan dukungan sosial

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat: a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b) standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan c) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 5) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan: a) penyandang disabilitas telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti; b) anak telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti; c) lanjut usia telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti; d) gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti; e) korban bencana provinsi untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi; dan f) korban bencana kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Dalam rangka mendukung prioritas nasional nomor 1 (satu) tentang pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPP PUPK, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi CRPD, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Kewilayahan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kesejahteraan;
- 2) masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal; serta
- 3) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun serta harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif untuk menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan.

Adapun untuk tahun 2024 tujuan dan sasaran dari Dinas Sosial Kota Padang Sidempuan adalah sebagai berikut

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA PADANG SIDEMPUNAN TAHUN 2024

	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial		Persentase PPKS yang tertangani	5%
		Meningkatnya Kuantitas Penanganan PPKS	Persentase PPKS Yang Tertangani	20%
		Meningkatnya Layanan Yang Berkualitas Oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Indeks Partisipasi Sosial	0,698
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial		Nilai Sakip Dinas Sosial	BB
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Dinas Sosial	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Sosial	75

Tabel 3.2
Penetapan Target Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial
Tahun 2024

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Awal		Target		Kondisi Akhir Periode
			2019	2020	2021	2022	
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	16,3	13	30	32	35
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100	66	100	100	100

Tabel 3.3
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Sosial
Kota Padangsidempuan Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET		
					2022	2023	2024
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di LuarPanti	Jumlah warganegara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	0%	100 %	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di LuarPanti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	0%	100 %	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di Luar Panti	Jumlah warga Negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	0%	100 %	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti	Persen	73%	100 %	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	Persen	66%	100 %	100%	100%

Tabel 3.4
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Padangsidempuan Tahun 2019-2023

TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	Satuan	Target	OPD	Ket
						2023		
1.2	Padatahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsil aki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	1.2.1 *	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase penduduk miskin	%	7,00	Sosial	
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan entan.							Proxy
		1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Jumlah Penyandang disabilitas yang miskin yang mendapat bantuan alat disabilitas	Orang	170	Sosial	Proxy
		1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.dasarnya dan inklusivitas		RTM	10.000	Sosial	
		1.3.1.(e)		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (anak/balita terlanjar, lansia miskin/terlanjar)	%	7,3	Sosial	

1.5	Padatahun 2030,membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan,dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.5.1(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana social		KK	150	Sosial
		1.5.1(c)	Pendampingan psiko sosial Korban bencana social		orang	7	Sosial
1.a	Menjaminmobilisasi yang signifikanterkaitsumberdayadariberbagaisumber, termasukmelaluikerjasamapembangunan yang lebihbaik, untukmenyediakansarana yang memadaidanterjangkaubaginegaraberkembang, khususnyanegarakurangberkembang, untukmelaksanakan program dankebijakanmengakhirikemiskinan di semuadimensi	1.a.1*	Proporsisum berdaya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsunguntuk program pemberantasan kemiskinan		%	PM	Sosial
		1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan social) sebagai persentase dari total belanja pemerintah		%	PM	Sosial

TUJUAN 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	Satuan	Target 2023	OPD	Ket
10.1	Padatahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	10.1.1 *	KoefisienGini		%	0,3117	Sosial	
		10.1.1(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		%	7,95	Sosial	
10.2	Pada tahun 2030, , memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonom dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama, atau kemampuan ekonomi atau status lainnya	10.2.1 *	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas		%	6,91	Sosial	

3.3. Program dan Kegiatan.

Sesuai perkembangan dengan pagu yang ada maka rencana tersebut disesuaikan dengan ketersediaan pagu, selain itu ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2024. Beberapa faktor dimaksud adalah :

1. Renstra Kementerian Sosial 2020-2024
2. Pencapaian SDGs yaitu :
 - a. Menurunnya tingkat kemiskinan dengan bantuan pangan non tunai
 - b. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
 - c. Pelayanan kesehatan penduduk miskin
 - d. Meningkatnya persentase disabilitas miskin yang mendapat bantuan
 - e. Program keluarga harapan
3. Adanya SPM untuk kabupaten kota dengan permensos nomor 9 tahun 2018.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Padang Sidempuan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

			undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan

			Penyediaan Sandang
			Penyediaan Alat Bantu
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
			Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
			Pelayanan Dukungan Psikososial
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Padang Sidempuan

Dinas Sosial Kota Padang Sidempuan

A	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	Kota Padang Sidempuan	100%	4.634.411.921				3.745.477.817
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	Kota Padang Sidempuan	8 Dokumen	66.691.206				15.945.690
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Padang Sidempuan	2 Dokumen	2.368.324	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	3.945.690

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Padang Sidempuan	6 Laporan	64.342.322	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	12.000.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	Kota Padang Sidempuan	100%	2.724.453.072			2.824.103.598
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Sidempuan	360 Orang/bulan	2.724.453.072	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	2.824.103.598
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	Kota Padang Sidempuan	100%	127.000.000			83.177.728

			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Padang Sidempuan	80 Paket	52.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			52.000.000
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Kota Padang Sidempuan	12 Orang	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	31.177.728
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	Kota Padang Sidempuan	100%	689.052.416				461.293.215
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Sidempuan	1 Paket	14.498.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	9.464.529
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Sidempuan	2 Paket	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	29.090.000

			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Padang Sidempuan	2 Paket	12.877.630	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	44.310.516
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Sidempuan	4 Paket	100.091.563	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	66.007.973
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Sidempuan	4 Paket	50.999.863	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	29.375.910
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Kota Padang Sidempuan	528 Dokumen	42.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	30.028.800
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Padang Sidempuan	40 Laporan	40.819.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	25.993.843

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Sidempuan	350 Laporan	397.766.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	227.021.644
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	Kota Padang Sidempuan	100%	520.562.000			11.590.000
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Padang Sidempuan	1 Unit	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Padang Sidempuan	4 Unit	20.562.000			11.590.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	Kota Padang Sidempuan	40 Laporan	294.224.644			262.265.408
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Sidempuan	24 Laporan	44.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	50.400.000

			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Sidempuan	5 Laporan	68.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	36.465.408
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Sidempuan	12 Laporan	180.884.644	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	175.400.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	Kota Padang Sidempuan	5 Unit	212.428.583				87.102.178
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Padang Sidempuan	1 Unit	73.430.000			Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	34.879.104
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Padang Sidempuan	4 Unit	78.998.583	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	32.639.074

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang Sidempuan	1 Unit	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	19.584.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Perorangan, Kelembagaan dan Sumber Dana Bantuan yang berperan aktif serta dapat dikelola oleh penyelenggara sosial	Kota Padang Sidempuan	100%	744.000.000			528.000.000
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Perorangan, Kelembagaan dan Sumber Dana Bantuan yang berperan aktif serta dapat dikelola oleh penyelenggara sosial	Kota Padang Sidempuan	100%	672,000,000			528.000.000

			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	26 Orang	369.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS Perorangan , Kelembagaan dan Sumber Dana Bantuan yang berperan aktif serta dapat dikelola oleh penyelenggara sosial	278.000.000
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	2 Lembaga	375.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS Perorangan , Kelembagaan dan Sumber Dana Bantuan yang berperan aktif serta dapat dikelola oleh penyelenggara sosial	250.000.000

			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis dan PMKS Lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti	Kota Padang Sidempuan	100%	595.329.844				553.324.200
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis dan PMKS Lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti	Kota Padang Sidempuan	695 Orang	595.329.844				553.324.200

			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	100 Orang	160.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis dan PMKS Lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti	128.840.000
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	100 Orang	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis dan PMKS Lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti	165.141.700

			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	20 Orang	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis dan PMKS Lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti	93.709.500
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	25 Orang	60.329.844	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis dan PMKS Lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti	49.142.000

			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	75 Orang	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis dan PMKS Lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti	38.146.000
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	25 Orang	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis dan PMKS Lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti	78.345.000

			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Kota Padang Sidempuan	50%	653.329.844				653.780.000
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Kota Padang Sidempuan	10.158	653.329.844				653.780.000
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kota Padang Sidempuan	95.329 Orang	155.599.844	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang mendapat perlindunga n dan jaminan sosial	52.500.000
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	11.000 Keluarga	60.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang mendapat perlindunga n dan jaminan sosial	42.000.000
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	11.000 Keluarga	351.730.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang mendapat perlindunga n dan jaminan sosial	372.000.000

			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	100 Orang	86.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	187.280.000
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tk.kota yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	Kota Padang Sidempuan	100%	930.329.443				587.364.450
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tk.kota yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	Kota Padang Sidempuan	250 Orang	349.121.164				238.546.450
			Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	150 Orang	66.221.164	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tk.kota yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	57.076.450

			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	50 Orang	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tk.kota yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	160.000.000
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	200 Orang	32.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tk.kota yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	21.470.000
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tk.kota yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	Kota Padang Sidempuan	34 Orang	581.208.679				348.818.000

			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	3 Kampung	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			46.818.000
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Padang Sidempuan	834 Orang	431.208.679	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			302.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dengan baik	Kota Padang Sidempuan	100%	75.000.000				35.000.000
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dengan baik	Kota Padang Sidempuan		75.000.000				35.000.000

			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Padang Sidempuan	1 Dokumen	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dengan bai	35.000.000
--	--	--	--	--	------------------------------	-----------	------------	--------------------------------------	--	------------

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kota Padang Sidempuan 2019-2023 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pemilihan program kegiatan Renja Dinas Sosial Kota Padang Sidempuan tahun 2024 didasarkan atas strategi dan kebijakan yang termuat dalam Renstra. Kegiatan yang dipilih diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Padang Sidempuan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Padang Sidempuan namun juga oleh sumber pendanaan lainnya. Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1.06.1.05.0.00.09.0000	Dinas Sosial		
1.06.1.05.0.00.09.0000	Dinas Sosial		
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daeah Kabupaten/Kota	4.634.411.921	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.691.206	
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.368.324	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi Kinerja SKPD Keuangan	64.322.882	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.724.453.072	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.724.453.072	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	689.052.416	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.498.360	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan Perengkapan Kantor	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	12.877.630	Dana Alokasi Umum (DAU)

1.06.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	100.091.563	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.999.863	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	42.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.819.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	397.766.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	520.562.000	
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.01.2.07.05	Pengadaan mebel	20.562.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	294.224.644	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa peralatan dan Perengkapan Kantor	68.940.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.884.644	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.428.583	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	60.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)

1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.430.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Perorangan dinas atau lapangan	78.998.583	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	127.000.000	
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	52.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.01.2.05.11	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	653.329.844	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	653.329.844	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	86.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	155.599.844	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	351.730.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	595.329.844	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	595.329.844	

1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	60.329.844	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	160.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	80.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.06	Program Penanganan Bencana	930.329.843	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	349.121.164	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	66.221.164	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.06.2.01.04	Penangan Khusus Bagi Kelompok Rentan	250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	32.900.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	581.208.679	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	150.000.000	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	431.208.679	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	744.000.000	

1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	744.000.000	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	369.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	375.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	75.000.000	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	75.000.000	
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)
	TOTAL	7.632.401.452	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja adalah merupakan dokumen yang berisi tentang target-target kerja yang diinginkan dimasa 1 tahun mendatang dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan kegiatan tahun 2024 demi mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial tahun 2024 ini disusun berdasarkan usulan dari bawah/ masyarakat yang merupakan aspirasi terhadap kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Penjaringan aspirasi ini dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan kemudian ke Musrenbang Kecamatan ditambah dengan adanya Forum SKD dan selanjutnya muaranya di Musrenbang Kabupaten/Kota. Sinkronisasi usulan kegiatan ini ditampung dalam suatu kesatuan untuk dijadikan dokumen penting dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2024, untuk selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD yaitu :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi, meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis dan untuk menyamakan persepsi dalam memberhasilkan program Keluarga Berencana Nasional untuk mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera.

Padang Sidempuan, September 2023

